

Nama Anggota :

1. Hansen Wonokusuma / XII MIPA 4 / 15
2. Irene Dayu Tiara Sukmabana / XII MIPA 4 / 17
3. Irene Wijono / XII MIPA 4 / 18
4. Theola Kiara Orso / XII MIPA 4 / 33

Darurat Militer 2024 di Korea Selatan: Sebuah Krisis Konstitusional

Pada 4 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer, sebuah keputusan yang segera memicu kontroversi. Tindakan tersebut dianggap inkonstitusional dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas demokrasi serta tata kelola negara. Intervensi militer dalam pemerintahan sipil merupakan langkah drastis yang seharusnya hanya diambil dalam kondisi ancaman nasional yang ekstrem. Namun, keputusan sepihak Yoon justru mengakibatkan dampak politik, ekonomi, dan sosial yang luas.

Dominic Waghorn dari *Sky News* mencatat bahwa militer tampaknya tidak siap untuk melaksanakan darurat militer, mengindikasikan bahwa Yoon bertindak tanpa koordinasi yang memadai. *The Economist* menyebut peristiwa ini sebagai krisis konstitusional, sementara beberapa pihak membandingkannya dengan kudeta militer di Myanmar pada 2021 serta kerusuhan di Gedung Capitol Amerika Serikat pada 6 Januari 2021. Ilmuwan politik Sidney Tarrow mengategorikan tindakan Yoon sebagai *self-coup* atau kudeta terhadap pemerintahannya sendiri.

Youngshik Bong, penasihat Kementerian Unifikasi Korea Selatan, menegaskan bahwa darurat militer hanya dapat diterapkan dalam keadaan luar biasa, seperti perang. Ia memperingatkan bahwa tindakan Yoon akan menimbulkan konsekuensi serius, terutama karena proses pemakzulan telah dimulai. Setelah pencabutan darurat militer, partai-partai oposisi segera mengajukan tuntutan pemakzulan dengan menyoroti aspek legalitas tindakan Yoon berdasarkan hukum konstitusi. Mahkamah Agung kemudian membuka penyelidikan untuk menentukan apakah keputusan tersebut telah melanggar prosedur hukum, mengingat Yoon tidak berkonsultasi dengan kabinet maupun parlemen sebelum mengambil langkah tersebut.

Pasar keuangan bereaksi negatif terhadap krisis ini. Won Korea Selatan mengalami depresiasi tajam, mencapai nilai terendah dalam 25 bulan sebelum mengalami pemulihan terbatas. *iShares MSCI ETF* turun hingga 5%, sementara indeks saham utama lainnya juga mengalami penurunan. Untuk mengendalikan volatilitas pasar, Bank of Korea bersiap melakukan intervensi,

sementara Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengadakan pertemuan darurat guna mengevaluasi dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Secara domestik, krisis ini memicu gejolak politik yang signifikan. Ketua Majelis Nasional Choo Kyung-ho mengakui bahwa ia tidak mengetahui keputusan tersebut sebelum diumumkan. Partai oposisi segera mengajukan mosi pemakzulan, sementara sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan Yoon mengundurkan diri secara massal. Bahkan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang berkuasa, mempertimbangkan untuk mencabut dukungan terhadap Yoon. Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang awalnya mengusulkan penerapan darurat militer, juga menghadapi ancaman pemakzulan.

Selain itu, gelombang protes muncul dari berbagai kalangan. Media massa arus utama mengutuk tindakan Yoon, sementara akademisi, pemuka agama, dan tokoh publik turut mengecam kebijakan tersebut. Sebuah petisi yang ditandatangani oleh 370 profesor dan peneliti dari Universitas Korea menuntut pengunduran dirinya.

Pada 4 Desember, anggota parlemen dari kubu oposisi mengajukan mosi pemakzulan dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun upaya awal gagal akibat kurangnya suara dukungan, tekanan publik semakin meningkat. Sepuluh hari kemudian, pada 14 Desember, pemungutan suara kedua berhasil dilakukan dengan 204 suara mendukung pemakzulan. Keputusan ini menyebabkan Yoon ditangguhkan dari jabatannya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai presiden sementara. Mahkamah Konstitusi kemudian diberikan waktu enam bulan untuk menentukan apakah Yoon harus diberhentikan secara permanen.

Darurat militer 2024 di Korea Selatan mengungkapkan betapa rentannya institusi demokrasi ketika kekuasaan eksekutif disalahgunakan. Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon tidak memiliki dasar hukum yang jelas, memicu ketidakstabilan ekonomi, dan menciptakan krisis konstitusional yang mendalam. Pemakzulan terhadap Yoon mencerminkan ketahanan sistem demokrasi Korea Selatan, namun juga menjadi peringatan akan bahaya tindakan eksekutif yang dilakukan secara sepihak. Dalam beberapa bulan ke depan, stabilitas politik Korea Selatan akan sangat bergantung pada kemampuan institusi hukum dan pemerintahan dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di tengah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.